

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KAMPUNG DI DISTRIK MULIA KABUPATEN PUNCAK JAYA (Studi Implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa)

David W. Telenggen¹⁾, Nur Aedah²⁾, Vince Tebay²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

Research Objectives: 1) To analyze the implementation of priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency. 2) To analyze the factors that hinder the implementation of priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency. 3) To analyze the efforts made in implementing priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency. The research method: is a qualitative descriptive with 12 informants, observation collection techniques, interviews and literature study. The analysis techniques are data display, reduction, grouping and conclusions. The results of the study: (1) The implementation of priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency is quite good. such as in communication, outreach has been made to the Village Government in District meetings. To provide explanations related to priority work programs in village administration specifically in population administration. The resources are sufficient, then the disposition in each village has been arranged to be able to support the implementation of the program even though it is not optimal. Then the bureaucratic structure has been implemented quite well. (2) The factors that hinder the implementation of priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency, namely the problem of human resources that is still lacking, besides that communication problems that cannot be understood by village officials make the implementation of priority programs not running optimally. Apart from that, the bureaucracy structure is less efficient and less dynamic. (3) Efforts made in implementing priority work programs in Village Administration Management in Mulia District, Puncak Jaya Regency by conducting training, guidance as well as formal and informal education for village officials to increase the knowledge of village officials. In terms of bureaucratic structure, there are efforts to improve the existing structure in coordination with the District Government of Mulia, Puncak Jaya Regency.

Abstrak :

Tujuan Penelitian: 1) Untuk menganalisis implementasi program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. 3) Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Metode penelitian : adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 12 orang, teknik pengumpulan observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis yaitu display data, reduksi, pengelompokan dan kesimpulan. Hasil penelitian : (1) Implementasi program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya sudah cukup baik. seperti pada komunikasi telah dilakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kampung dalam rapat Distrik. Untuk memberikan penjelasan- penjelasan terkait program kerja prioritas pada administrasi kampung khusus pada administrasi penduduk. Sumber daya cukup memadai, kemudian disposisi di setiap kampung sudah diatur untuk dapat mendukung pelaksanaan program walaupun belum maksimal. Kemudian untuk struktur birokrasi sudah dilaksanakan cukup baik. (2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya yaitu permasalahan sumber daya manusia yang masih kurang, selain itu juga permasalahan komunikasi yang belum dapat dipahami oleh aparat kampung menjadikan pelaksanaan program prioritas tidak berjalan maksimal. Selain itu juga pada sisi struktur birokrasi kurang efisien dan kurang dinamis. (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dengan mengadakan pelatihan, bimbingan selain itu juga pendidikan formal dan informal kepada aparat kampung untuk dapat meningkatkan pengetahuan aparat kampung. Dari segi struktur birokrasi ada upaya untuk memperbaiki struktur yang ada dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

Keyword: Implementation, Management, Village Administration, Puncak Jaya Regency, Papua

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa perubahan sistem pemerintahan yang sangat signifikan terutama hubungan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka terjadi pergeseran sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pembangunan di daerahnya berdasarkan kebutuhan, potensi budaya dan nilai-nilai lokal yang ada.

Dalam pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pembangunan. Maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi titik berat pada kesetaraan kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Papua, terutama dalam hal praktik-praktik pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut menyangkut kedudukan tugas, fungsi, dan kewenangan Distrik. Perubahan tersebut mengubah organisasi pembiayaan, pengisian personel, pemenuhan kebutuhan logistik, serta akuntabilitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka mempercepat proses implementasi undang-undang otonomi khusus. Maka Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Perda No. 2 Tahun 2008

tentang Pemekaran Kampung yang semula terdiri dari 67 kampung, untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang terisolir di pedalaman maka dalam perkembangan selanjutnya telah dilakukan pemekaran kampung dari 67 kampung menjadi 302 kampung.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Berbagai program yang telah diarahkan oleh pemerintah semua program pembangunan tersebut harus menyertakan perencanaan yang baik dalam menentukan tim pelaksanaan, anggaran biaya, sumber dana serta evaluasinya.

Tentunya dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa harus mampu melaksanakan administrasi desa dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa membagi jenis dan bentuk administrasi desa terdiri dari: Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Administrasi lainnya (Irawan, 2017).

Dari posisi kedudukan tugas dan kewenangan, Pemerintah Kampung berada dibawah Pemerintahan Distrik (Aedah, 2017). Maka Pemerintah Distrik dapat dikatakan distrik sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat melalui otonomi khusus Papua. Distrik dalam hal ini menjadi tangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat luas di wilayah masing-masing

distrik. Dalam hal ini distrik harus mampu menerjemahkan dan menyesuaikan berbagai kebijakan serta pelayanan yang sesuai dengan masyarakat (Wonda, dkk, 2019). Oleh karena itu Distrik diharapkan mampu mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya baik fungsi-fungsi koordinatif maupun pembinaan kepada pemerintah desa dan kelurahan (Dunn, 2003).

Dalam proses pelaksanaan administrasi pemerintah desa/kampung melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa/kampung yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah desa/kampung yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Distrik terhadap aparat pemerintah desa/kampung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016.

Maka dari itu Pemerintah Distrik memiliki peranan penting dalam melakukan pembinaan administrasi pemerintah desa/kampung di wilayah kerjanya (Dimara, dkk, 2018). Hal ini dilakukan untuk dapat mengembangkan sistem pemerintahan desa/kampung yang berfungsi sebagai sumber dan informasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Selain itu pembinaan dari Pemerintah Distrik dalam pengadministrasian desa/kampung amat penting dilakukan agar dapat tercapai pembangunan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga pemerintah desa/kampung

mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya (Wonda, dkk, 2019).

Untuk mengimplementasikan amarat Undang-Undang Desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 maka Pemerintah Distrik Mulia merumuskan program kerja prioritas. Dimana Dalam Dokumen Program Kerja Pemerintah Distrik Mulia. Penulis merumuskan dan merealisasikan beberapa program kerja prioritas yang dilakukan yaitu :

1. Penataan Administrasi Kampung
2. Mendirikan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk mempermudah masyarakat mendapat sertifikat tanah.
3. Bekerja sama dengan TNI membangun rumah honai sehat di 3 kampung.
4. Menyamakan harga denda adat di tingkat kampung menjadi seragam antara 1 kampung dengan kampung lain.
5. Membuka pelayanan peralatan E-KTP Elektronik bekerjasama dengan Kementerian Kependudukan dan Dinas Kebudayaan Catatan Sipil Pertama di Distrik Mulia.
6. Pembinaan kemasyarakatan, mengadakan pertandingan sepak bola Distrik Cup antar kampung untuk membangun komunikasi yang positif antar sesama kampung.

Dari beberapa program prioritas diatas, penulis pada penelitian ini memfokuskan penelitian pada implementasi program prioritas Pengelolaan Administrasi Kampung di Pemerintah Distrik Mulia lebih khusus pada administrasi penduduk. Dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2) dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi kependudukan yang ada di desa/kampung meliputi : Buku data induk penduduk desa; buku data mutasi penduduk desa; buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan; dan buku data penduduk sementara.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di lokasi penelitian yaitu di beberapa Kampung Wilayah Kerja Distrik Mulia terkait proses dan tata aturan penataan administrasi kampung yang dilaksanakan, diperoleh beberapa temuan diantaranya sebagai berikut:

Aparatur Kampung memiliki hak dan kewajiban selain sebagai perangkat desa. Maka haruslah dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dimana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pengimplementasian program kerja prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Distrik Mulia. Namun kenyataannya beberapa kampung di Distrik Mulia masih belum dapat mengimplementasikan kebijakan administrasi desa/kampung secara optimal contohnya administrasi penduduk yang masih belum akurat atau masih ada kesalahan pendataan.

Melihat fakta di lokasi penelitian dimana beberapa kampung di wilayah kerja Distrik Mulia, dalam melakukan tata kelola administrasi desa masih berjalan apa adanya. Dimana uraian tugas dan tanggung jawab dari aparatur kampung masih belum dapat dijalankan. Atau ada beberapa petugas yang merangkap pekerjaan. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar pegawai yang bekerja di kantor Pemerintah Kampung.

Nampaknya sikap Aparatur Pemerintah Kampung belum sejalan dengan kebijakan program kerja prioritas dari Pemerintah Distrik Mulia karena tidak membagi uraian tugas pekerjaan secara merata kepada seluruh aparatur yang ada di Pemerintah Kampung. Selain itu juga penulis melihat ada beberapa kampung yang dalam hal struktur birokrasi masih belum ideal yang dapat menyebabkan koordinasi dan informasi terhambat. Hal ini akan menghambat pengimplementasian program kerja prioritas dari Pemerintah Distrik Mulia.

Permasalahan yang ditemukan, yakni Beberapa kampung di Distrik Mulia masih belum dapat mengimplementasikan

kebijakan administrasi desa/ kampung secara optimal seperti kesalahan pendataan. Kemudian, Uraian tugas dan tanggung jawab dari aparatur kampung di Distrik Mulia masih belum dapat dijalankan. Seperti ada beberapa petugas yang merangkap pekerjaan. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar pegawai yang bekerja di Kantor Pemerintah Kampung. Sikap Aparatur Pemerintah Kampung juga belum sejalan dengan kebijakan program kerja prioritas dari Pemerintah Distrik Mulia karena tidak membagi uraian tugas pekerjaan secara merata kepada seluruh aparatur yang ada di Pemerintah Kampung. Lalu beberapa kampung di Distrik Mulia dalam hal struktur birokrasi masih belum ideal yang dapat menyebabkan koordinasi dan informasi terhambat. Hal ini akan menghambat implementasi program kerja prioritas dari Pemerintah Distrik Mulia.

Olehnya itu kajian ini menyoroti mengenai implementasi program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian, mendalami Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, serta menelisik Upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi atau konteks tertentu, dan tidak memerlukan analisis uji statistik. Dimana menurut Moleong (2009) penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian ini dilakukan di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya pada bulan Juli 2020.

Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu aparat pemerintah kampung yang mana merupakan salah satu aktor pelaksana Program Kerja Prioritas Pemerintah Distrik Mulia. Selain itu juga tokoh-tokoh masyarakat dan warga kampung yang mana sebagai pembanding informasi yang penulis peroleh dari Pemerintah Kampung. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 12 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara untuk penelitian lapangannya dan studi dokumentasi untuk pencarian data sekunder dalam melengkapi kebutuhan data statistik yang disediakan pada dokumen pemerintahan setempat (Miles & Huberman, 2007). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, pengelompokan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2005)

PEMBAHASAN

Implementasi program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III (dalam Nugroho, 2004; Winarno, 2002) yang mana menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Output yang diharapkan yaitu pemerintah kampung dapat mengimplementasikan program kerja prioritas dalam pengelolaan administrasi kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dengan baik berdasarkan uraian tugasnya.

Komunikasi Program Kerja Prioritas

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan (Subarsono, 2005). Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan

informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Informasi-informasi yang penulis peroleh dari 3 (tiga) kampung yang menjadi objek lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

diketahui bahwa komunikasi atau sosialisasi kepada aparat kampung terkait program kerja prioritas dalam pengelolaan administrasi kampung khususnya administrasi penduduk di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya sudah dilakukan. Selain itu juga aparat Pemerintah Kampung yang hadir dalam kegiatan sosialisasi program diberikan pedoman teknis pelaksanaan program kerja prioritas dimaksud.

Namun yang mampu memahami materi yang disampaikan aparat Distrik Mulia pada kegiatan sosialisasi tentang program kerja prioritas dari Pemerintah Distrik Mulia khususnya administrasi kependudukan yang tertuang dalam pedoman teknis dengan baik hanya Kampung Yalinggua.

Sedangkan Kampung Karubate belum dapat memahami materi sosialisasi program kerja prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Distrik Mulia dan pedoman teknis yang diberikan kepada aparat Kampung yang hadir. Oleh karena penjelasan yang disampaikan kepada aparat kampung kurang konkrit atau tidak detail menginformasikan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan pada pedoman teknis yang diberikan. Kemudian, hal tersebut juga terjadi pada Kampung Kulurik, dimana aparat kampung Kulurik yang hadir dalam kegiatan sosialisasi program kerja prioritas belum mampu memahami materi sosialisasi yang disampaikan dan juga pedoman teknis yang diberikan.

Sumber Daya (SDM dan Biaya)

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan. Maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka program

atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen (Suharno, 2010). Informasi-informasi yang penulis peroleh dari 3 (tiga) kampung yang menjadi objek lokasi penelitian

Diketahui bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan juga biaya untuk mendukung pelaksanaan program kerja prioritas khususnya administrasi penduduk di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya belum berjalan dengan baik. Karena dari 3 (tiga) kampung yang menjadi lokasi penelitian. Hanya Pemerintah Kampung Yalinggua yang sudah memiliki sumber daya manusia (SDM) aparatur dan biaya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program kerja prioritas sesuai pedoman teknis yaitu kegiatan pencatatan kepala keluarga, perpindahan penduduk, penambahan penduduk, pencatatan kelahiran dan kematian.

Sedangkan Pemerintah Kampung Karubate belum memiliki sumber daya manusia (SDM) aparatur yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan program kerja prioritas khususnya administrasi penduduk sesuai pedoman teknis yang diterima. Meskipun telah tersedia dana atau biaya untuk setiap item kegiatan seperti pendataan kepala keluarga, perpindahan penduduk, penambahan penduduk, pencatatan kelahiran dan kematian.

Hal tersebut juga terjadi pada Pemerintah Kampung Kulurik belum memiliki sumber daya manusia (SDM) aparatur yang mumpuni dalam pelaksanaan program kerja prioritas sesuai pedoman teknis. Meskipun didukung dengan ketersediaan biaya untuk menunjang pelaksanaan program kerja prioritas tersebut.

Disposisi

Diketahui bahwa tingkat kepatuhan dari aparatur kampung (disposisi) untuk mendukung pelaksanaan program kerja prioritas khususnya administrasi penduduk di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya belum berjalan dengan baik. Karena dari 3 (tiga) kampung yang menjadi lokasi penelitian. Hanya Pemerintah Kampung

Yalinggua yang memiliki sikap patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu juga aparat kampung Yalinggua mampu melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di wilayah kerjanya dengan baik.

Sedangkan aparatur Pemerintah Kampung Karubate meskipun sudah memiliki tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan disiplin kerja yang baik. Namun tidak dapat melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dengan maksimal. Oleh karena masih ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai pedoman teknis pengelolaan administrasi penduduk yang ditetapkan oleh Pemerintah Distrik Mulia.

Hal tersebut juga terjadi pada Pemerintah Kampung Kulurik, dimana aparatur Kampung Kulurik belum memiliki kepatuhan yang baik terhadap kebijakan yang telah ditetapkan terkait administrasi kependudukan. Selain itu juga pada pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan tidak berjalan dengan maksimal atau tidak sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan administrasi penduduk yang ditetapkan oleh Pemerintah Distrik Mulia.

Struktur Birokrasi

diketahui bahwa struktur birokrasi dari Pemerintah Kampung untuk mendukung implementasi program kerja prioritas khususnya administrasi penduduk dari Pemerintah Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya belum baik. Karena dari 3 (tiga) kampung yang menjadi lokasi penelitian. Hanya Pemerintah Kampung Yalinggua yang memiliki struktur birokrasi yang cukup sederhana dan dinamis, struktur organisasi, uraian jabatan serta evaluasi jabatan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dalam pengelolaan administrasi kampung khususnya administrasi kependudukan. Selain itu juga aparatur melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian jabatan yang telah ditetapkan.

Sedangkan aparatur Pemerintah Kampung Karubate meskipun sudah memiliki struktur birokrasi, struktur

organisasi, uraian jabatan yang sederhana dan dinamis untuk mendukung pelaksanaan program kerja prioritas. Namun dalam pelaksanaannya tidak dijalankan sesuai uraian jabatan yang ada. Seperti ada aparatur kampung yang merangkap tugas. Hal ini menjadikan pelaksanaan program kerja prioritas tidak efektif.

Hal tersebut juga terjadi pada Pemerintah Kampung Kulurik, dimana Pemerintah Kampung Kulurik sudah memiliki struktur birokrasi yang sederhana dan dinamis untuk mendukung pelaksanaan program kerja prioritas. Selain itu juga telah memiliki struktur organisasi. Uraian jabatan serta evaluasi jabatan. Namun dalam pelaksanaannya, aparatur tidak memperhatikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai uraian jabatan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

Pada bagian ini mendeskripsikan hasil temuan lapangan terkait faktor yang menghambat pelaksanaan program kerja prioritas dalam pengelolaan administrasi kampung khususnya administrasi kependudukan di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Sebagai dasar pengungkapan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program kerja prioritas yang hendak dikaji. Maka penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III (dalam Nugroho, 2004; Winarno, 2002) yang mana menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut pemaparannya :

Komunikasi Program Kerja Prioritas

Penghajian hambatan pada sisi komunikasi program kerja prioritas yang ditetapkan Pemerintah Distrik Mulia perlu untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan. Informasi-informasi yang penulis peroleh dari 3 (tiga) kampung yang menjadi objek lokasi penelitian terkait hambatan komunikasi program kerja prioritas.

Diketahui ada beberapa hambatan yang terjadi dalam komunikasi atau sosialisasi terkait program kerja prioritas dalam pengelolaan administrasi kampung khususnya administrasi penduduk di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Pada Kampung Yalinggua terjadi permasalahan pada komunikasi program yang kurang jelas dari pemerintah distrik, selain itu juga perlu informasi yang jelas dan setiap program kepada masyarakat kampung. Kemudian di Kampung Karubate terjadi masalah Informasi program dari pemerintah distrik kurang jelas dan tidak dapat dipahami dengan baik, kemudian kurang kerjasama antara pemerintah distrik dan pemerintah kampung, selain itu juga permasalahan kepala kampung tidak ditempat sehingga tidak mengikuti kegiatan sosialisasi program kerja dari Pemerintah Distrik. Selanjutnya hambatan komunikasi yang terjadi di Kampung Kulurik yaitu daya tangkap informasi dari aparatur kampung masih kurang terkait sosialisasi program. Jalur komunikasi tidak baik, jarak tempuh kantor distrik dan kampung jauh.

Sumber Daya (SDM dan Biaya)

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan (Wahab, 2002). Maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Informasi-informasi yang penulis peroleh dari 3 (tiga) kampung yang menjadi objek lokasi penelitian terkait hambatan sumber daya meliputi sumberdaya manusia (SDM) dan juga biaya dalam pelaksanaan setiap kegiatan program kerja prioritas khususnya administrasi penduduk di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

Diketahui bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan juga biaya untuk mendukung pelaksanaan program kerja prioritas khususnya administrasi penduduk di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya belum berjalan dengan baik. Karena ada permasalahan yang terjadi terkait sumber daya. Pada Kampung Yalinggua ada hambatan terkait sumber daya adalah pada sisi Sumber Daya Manusia. Oleh karena masih banyak aparatur Kampung yang berpendidikan rendah.

Kemudian hambatan sumber daya yang terjadi di Pemerintah Kampung Karubate yaitu SDM aparatur yang masih rendah dari aparatur kampung, Program tidak berjalan maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kampung Kulurik permasalahan terkait sumber daya yang terjadi di Pemerintah Kampung Kulurik yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan masih sangat terbatas, Sumber Daya Manusia masih kurang. Selain itu juga kurangnya pelatihan dan pembinaan kepada aparatur kampung.

Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (Juniarso, 2009). Untuk itu perlu dikaji hambatan-hambatan yang terjadi pada sisi disposisi pada Pemerintahan Kampung di Wilayah Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Informasi-informasi yang penulis peroleh dari 3 (tiga) kampung yang menjadi objek lokasi penelitian terkait hambatan disposisi.

Diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam disposisi pelaksanaan program prioritas pengadministrasian kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Pada Kampung Yalinggua permasalahan yang terjadi yaitu Aparatur kampung Yalinggua kurang paham tugas dan tanggung jawab

masing-masing dalam pelaksanaan kegiatannya. Kemudian pada Kampung Karubate permasalahan disposisi yang terjadi yaitu petugas kurang paham dan belum memiliki pengetahuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga program prioritas dalam pengadministrasian kampung khususnya administrasi penduduk belum dapat berjalan dengan baik. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi di Kampung Kulurik, permasalahan yang terjadi terkait disposisi yaitu Aparatur kampung yang tidak memahami alur disposisi pelaksanaan program prioritas pengelolaan administrasi kampung.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk dapat mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Apabila struktur birokrasi tidak tepat, maka pelaksanaan kebijakan akan melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Informasi-informasi yang penulis peroleh dari 3 (tiga) kampung yang menjadi objek lokasi penelitian terkait hambatan yang terjadi dalam struktur birokrasi Pemerintahan Kampung di Wilayah Pemerintah Distrik Mulia

diketahui bahwa ada beberapa permasalahan dalam struktur birokrasi dari Pemerintahan Kampung di Wilayah Pemerintah Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Pada Pemerintahan Kampung Yalinggua permasalahan yang terjadi yaitu aparat kampung tidak bekerja sesuai struktur jabatan yang telah ditetapkan. Aparat tidak patuh pada tugas-tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Struktur birokrasi terlalu rumit dan tidak sederhana. Kemudian pada Kampung Karubate permasalahan struktur birokrasi yang terjadi yaitu aparat kampung ada yang merangkap kerja. Sehingga hasil kerja tidak maksimal. Aparat tidak paham tugas dan tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi, uraian jabatan yang ada. Sementara itu, pada kampung Kulurik, permasalahan yang terjadi terkait struktur

birokrasi yaitu aparat kampung kurang baham tugas dan jabatannya sesuai struktur organisasi kampung. Aparat tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing jabatan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya

Komunikasi Program Kerja Prioritas

Diketahui ada beberapa upaya dalam komunikasi atau sosialisasi terkait program kerja prioritas dalam pengelolaan administrasi kampung khususnya administrasi penduduk di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Pada Kampung Yalinggua terjadi permasalahan pada komunikasi program yang kurang jelas dari pemerintah distrik, selain itu juga perlu informasi yang jelas dan setiap program kepada masyarakat kampung. Kemudian di Kampung Karubate terjadi masalah Informasi program dari pemerintah distrik kurang jelas dan tidak dapat dipahami dengan baik, kemudian kurang kerjasama antara pemerintah distrik dan pemerintah kampung, selain itu juga permasalahan kepala kampung tidak ditempat sehingga tidak mengikuti kegiatan sosialisasi program kerja dari Pemerintah Distrik. Selanjutnya hambatan komunikasi yang terjadi di Kampung Kulurik yaitu daya tangkap informasi dari aparat kampung masih kurang terkait sosialisasi program. jalur komunikasi tidak baik, jarak tempuh kantor distrik dan kampung jauh.

Sumber Daya (SDM dan Biaya)

Diketahui bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan juga biaya untuk mendukung pelaksanaan program kerja prioritas khususnya administrasi penduduk di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya belum berjalan dengan baik. Karena ada permasalahan yang terjadi terkait sumber daya. Pada Kampung Yalinggua ada hambatan terkait sumber daya adalah pada sisi Sumber Daya Manusia. Oleh karena masih banyak

aparatur Kampung yang berpendidikan rendah.

Kemudian hambatan sumber daya yang terjadi di Pemerintah Kampung Karubate yaitu SDM aparat yang masih rendah dari aparat kampung, Program tidak berjalan maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kampung Kulurik permasalahan terkait sumber daya yang terjadi di Pemerintah Kampung Kulurik yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan masih sangat terbatas, Sumber Daya Manusia masih kurang. Selain itu juga kurangnya pelatihan dan pembinaan kepada aparat kampung.

Disposisi

diketahui bahwa ada beberapa upaya dalam disposisi pelaksanaan program prioritas pengadministrasian kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Pada Kampung Yalinggua permasalahan yang terjadi yaitu Aparatur kampung Yalinggua kurang paham tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kegiatannya. Kemudian pada Kampung Karubate permasalahan disposisi yang terjadi yaitu petugas kurang paham dan belum memiliki pengetahuan untuk melaksanakan tugas - tugasnya. Sehingga program prioritas dalam pengadministrasian kampung khususnya administrasi penduduk belum dapat berjalan dengan baik. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi di Kampung Kulurik, permasalahan yang terjadi terkait disposisi yaitu Aparatur kampung yang tidak memahami alur disposisi pelaksanaan program prioritas pengelolaan administrasi kampung.

Struktur Birokrasi

diketahui bahwa ada beberapa upaya dalam struktur birokrasi dari Pemerintah Kampung di Wilayah Pemerintah Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Pada Pemerintah Kampung Yalinggua permasalahan yang terjadi yaitu aparat kampung tidak bekerja sesuai struktur jabatan yang telah ditetapkan. Aparat tidak patuh pada tugas-tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Struktur

birokrasi terlalu rumit dan tidak sederhana. Kemudian pada Kampung Karubate permasalahan struktur birokrasi yang terjadi yaitu aparat kampung ada yang merangkap kerja. Sehingga hasil kerja tidak maksimal. Aparat tidak paham tugas dan tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi, uraian jabatan yang ada. Sementara itu, pada kampung Kulurik, permasalahan yang terjadi terkait struktur birokrasi yaitu aparat kampung kurang paham tugas dan jabatannya sesuai struktur organisasi kampung. Aparat tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing jabatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya sudah cukup baik. seperti pada komunikasi telah dilakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kampung dalam rapat Distrik. Untuk memberikan penjelasan- penjelasan terkait program kerja prioritas pada administrasi kampung khusus pada administrasi penduduk. Sumber daya cukup memadai, kemudian

disposisi di setiap kampung sudah diatur untuk dapat mendukung pelaksanaan program walaupun belum maksimal. Kemudian untuk struktur birokrasi sudah dilaksanakan cukup baik.

Kemudian, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya yaitu permasalahan sumber daya manusia yang masih kurang, selain itu juga permasalahan komunikasi yang belum dapat dipahami oleh aparat kampung menjadikan pelaksanaan program prioritas tidak berjalan maksimal. Selain itu juga pada sisi struktur birokrasi kurang efisien dan kurang dinamis.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program kerja prioritas dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dengan mengadakan pelatihan, bimbingan selain itu juga pendidikan formal dan informal kepada aparat kampung untuk dapat meningkatkan pengetahuan aparat kampung. Dari segi struktur birokrasi ada upaya untuk memperbaiki struktur yang ada dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedah, N. (2017). Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3).
- Dimara, S. G., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2018). Peranan Pemerintah Distrik dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Distrik Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yogyakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Juniarso, R. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Miles, M. & Huberman, M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi*. Jakarta:Gramedia.

- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Wahab, S. A. (2002). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wenda, Y., Rompas, W., & Ruru, J. M. (2019). Kinerja Pemerintah Dlam Pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah di Distrik Kambu Kabupaten Tolikara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(82).
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wonda, W., Suripatty, P. I., & Widodo, A. (2019). Upaya Pemerintah Kampung terhadap Pembinaan Masyarakat di Kampung Kali Semen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire. *JIPEM Jurnal Kajian Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah*, 1(1), 40-59.